

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI TERMINAL KEFAMENANU KELURAHAN KEFA SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Selviana Anin¹, Agustinus Longa Tiza², Yohanes Fritantus³

Universitas Timor, Kefamenanu selvianaanin09@gmail.com

Universitas Timor, Kefamenanu agustiza@yahoo.co.id

Universitas Timor, Kefamenanu yfritantus@gmail.com

ABSTRAK

Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran dan penyakit, yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat, dimana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan keterlibatan masyarakat harus lebih baik sehingga implementasi kebijakan yang dilakukan di terminal kefamenanu mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dan mampu mewujudkan kebersihan lingkungan sekitar terminal.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, kebersihan lingkungan

ABSTRACT

Environmental cleanliness is a condition that is free from all dirt and disease, which can be detrimental to all aspects relating to every activity and behavior in the community's environment, where human life cannot be separated from both the natural environment and the social environment. The method used is descriptive qualitative and data collection uses observation, interview and documentation techniques. From the results of the research conducted, it can be concluded that the implementation of policies carried out by the Environmental Service and community involvement must be better so that the implementation of policies carried out at the Kefamenanu bus station is able to achieve the planned goals and is able to create a clean environment around the bus station.

Key words: Policy implementation, environmental cleanliness

PENDAHULUAN

Kota akan selalu berhubungan erat dengan perkembangan lahan baik dalam kota itu sendiri maupun pada daerah yang berbatasan atau daerah sekitarnya. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan kota yang baik merupakan kota yang dapat mengembangkan antara kondisi lingkungan dengan pendapatan penduduk yang akan ditampung di dalam kota tersebut. Sistem Kebersihan Lingkungan di Kota Kefamenanu dapat dikatakan masih tergolong menggunakan konsep tradisional dan manual yang menganut konsep pengumpulan.

Kebersihan merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran dan penyakit, yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat, dimana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Masalah tentang kebersihan di lingkungan Kefamenanu khususnya di sekitaran terminal, yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat yang tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan, misalnya lingkungan yang kotor karena membuang sampah sembarangan hingga mengakibatkan masalah sehingga membuat air bersih menjadi tercemar. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, dan belum adanya tindakan yang serius dari pemerintah dalam mengupayakan kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Kebersihan lingkungan dan kesehatan tempat-tempat umum seperti di terminal juga perlu dijaga, karena

mengingat banyaknya orang-orang yang akan berkumpul untuk melakukan kegiatan serta banyaknya orang yang akan memanfaatkan hasil produk tersebut yang berarti meningkatkan juga hubungan kontak antara orang satu dengan yang lain, berarti pula kemungkinan terjadinya penularan penyakit baik secara langsung dan tidak langsung yaitu melalui perantara (berupa benda, alat yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan) akan lebih meningkat.

Di tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana orang banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidental dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Manusia dan lingkungannya merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, pengenalan terhadap lingkungan beserta segala masalahnya merupakan suatu cara untuk dapat lebih menentukan fungsi dan peranan manusia dalam lingkungan hidup. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan perbaikan lingkungan adalah bahwa lingkungan tempat manusia hidup, khususnya tempat manusia bekerja, bergerak, dan belajar harus memenuhi syarat kesehatan. Artinya lingkungan tersebut tidak mudah menimbulkan hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Pengaruh buruk dari lingkungan sebenarnya dapat dicegah dengan mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sehat dan bersih serta menciptakan lingkungan yang baik. Kebiasaan hidup sehat dilakukan dalam berbagai cara seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan halaman secara rutin, membersihkan kamar mandi dan bak mandi secara rutin. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sudah mengeluarkan himbauan agar seluruh masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Tetapi masyarakat yang belum sadar dan membuang sampah di tempat

pembuangan yang telah disiapkan, terkadang warga membuang seenaknya saja. Akibatnya, sampah-sampah yang dibuang tersebut tidak terkumpul di tong sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah tetapi masih meluber keluar bahkan ada masyarakat yang membuang sampah di luar tong sampah tersebut, dan bahkan ada bak penampung sampah yang sudah penuh, tetapi tidak diangkat oleh mobil sampah, sehingga menyebabkan sampah berserakan dimana-mana. Selain berserakan dan diterbangkan angin, sampah-sampah tersebut juga mengeluarkan aroma yang kurang sedap sehingga mengganggu warga yang melintas di lokasi tersebut atau warga yang berada di sekitar tong sampah tersebut.

Ada terdapat 2 orang yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sekitar terminal, setiap hari mulai dari jam 06.00-09.00 Wita. Hanya saja di Terminal aktivitasnya padat sekali sehingga sampah juga menumpuk sangat cepat. Di Terminal terdapat 2 TPS (tempat pembuangan sementara), setelah petugas membersihkan semua sampah dibuang ke TPS. Kemudian akan ada mobil yang mengangkut sampah, maka setelah itu sampai akan kembali menumpuk lagi. Tapi dari pemerintah akan berupaya untuk tidak ada keluhan lagi terkait dengan sampah-sampah yang mengganggu ini.

Bahkan sekarang, sampah menjadi masalah besar karena jumlah sampah yang semakin banyak dan banyaknya sampah yang sulit di daur ulang (Setya, 2017: 55). Pendekatan pemasaran hijau (*green marketing approach*) pada area produk diyakini dapat meningkatkan integrasi dari isu lingkungan pada seluruh aspek dari aktivitas masyarakat, mulai dari

formulasi strategi, perencanaan, penyusunan, sampai produksi dan penyaluran atau distribusi dengan pelanggan.

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan permasalahan yang akan terus menerus dihadapi baik oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya dan lebih khususnya Kota Kefamenanu maupun penduduknya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tidak akan terlepas dari bertambahnya jumlah volume sampah, sementara tempat pembuangan akhir sampah (TPA) sebagai basis pengelolaan belum dimiliki.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya): pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

2. Pengertian Implementasi kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster's Dictionary (1979:914), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”,

yaitu mengisi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Menurut Nurdin Usman (2013), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “*implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps)*”.

Teori George C. Edward III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (*Communicattions*), sumber daya (*Resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Dari ke empat faktor ini harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang

harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangidistorsi implementasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George C. Edward III sebagai berikut: efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi

dan insentif. Struktur birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP) andfragmentasi*. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red- tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja stuktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah: Membuat *standar operating prosedur (sop)* dan melakukan fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian akan mempermudah peneliti untuk terpusat pada satu permasalahan yang diteliti, sehingga observasi dan dan analisisnya menjadi terarah. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kebersihan Lingkungan di Terminal Kefamenanu Kelurahan Kefa Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. Terkait dengan penelitian kebijakan ini saya menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III difokuskan pada: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti serta melalui pengumpulan

dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Selain itu, Teknik pengumpulan data yaitu a). Observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap fenomena-fenomena sosial masyarakat yang terjadi khususnya tentang Kebersihan Lingkungan di Terminal Kefamenanu Kelurahan Kefa Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan langsung dengan tujuan agar lebih memudahkan agar peneliti dalam memahami objek yang diteliti. b). Wawancara. Dalam mengumpulkan data dilapangan, penulis juga menggunakan teknik wawancara. Metode wawancara digunakan untuk menggali masalah melalui tanya jawab langsung dengan informan berdasarkan pedoman yang dirancang selanjutnya hasil wawancara kemudian di analisa sehingga menentukan rekomendasi penelitian. c). Dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lampau yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen-dokumen berupa gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen berupa karya-karya yang dapat dilihat dari karya seni yang berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen juga dapat dikatakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dirumuskan. Miles dan Huberman (1992:1) menguraikan bahwa: a). Reduksi Data yaitu merangkum, memilih dan memfokuskan pada pengambilan data yang pokok/penting sesuai dengan

focus penelitian. Dengan demikian, data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Salah satu bentuk analisa bagaimana meninjau kegiatan tentang Kebersihan Lingkungan di Terminal Kefamenanu Kelurahan Kefa Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara dan memeriksa dengan cermat tentang kebersihan lingkungan, untuk mengetahui hasilnya dapat dikategorikan pada langka-langka untuk memastikan hasil dal tujuan yang dicapai. b). Penyajian Data yaitu Display data dengan maksud agar data yang sudah dihimpun akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan petugas untuk melakukan tindakan tidak lain adalah untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi kebersihan lingkungan. c). Penarikan Kesimpulan yaitu Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila delum ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan, suatu kegiatan mencari data di lingkungan yang akan dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan tentang kebersihan lingkungan dalam melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, di lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kebersihan lingkungan di Terminal Kefamenanu Kelurahan Kefa Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belum efektif karena dipengaruhi dalam berbagai hal:

1. Komunikasi

Komunikasi belum maksimal karena komunikasi masih sangat terbatas, yang mempengaruhi komunikasi terbatas dikarenakan konsistensinya sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kebersihan lingkungan di terminal kefamenanu, karena disini komunikasi yang di berikan pemerintah masih kurang maka masyarakat belum memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya belum maksimal karena sumberdaya yang diberikan masih sangat kurang dikarenakan stafnya, mengenai faktor informasi yang di berikan dari Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap lemahnya fungsi kontrol terhadap petugas kebersihan.

3. Disposisi

Disposisi belum maksimal karena

disposisi yang diberikan masih sangat terbatas dikarenakan efek disposisi dan inisiatif sangat berpengaruh implementasi kebijakan, sehingga dapat kita ketahui bahwa respon dan sikap dari Dinas Lingkungan Hidup sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang kebersihan lingkungan di sekitaran terminal kefamenanu sehingga kedepannya masyarakat harus sadar akan menjaga kebersihan lingkungan

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi belum maksimal karena struktur birokrasi yang di berikan masih kurang dikarenakan dalam membuat SOP dan Fragmentasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, terkait dengan sikap pelaksanaan suatu kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan tugas dengan baik namun masih kurangnya sosialisasi dan tanda larangan yang di berikan agar masyarakat bisa mematuhi tanda larangan tersebut sehingga lingkungan terminal kefamenanu bersih dari kotoran.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas maka dapat simpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kebersihan lingkungan di terminal kefamenanu kelurahan kefa Selatan kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh variabel Komunikasi belum maksimal karena komunikasi masih sangat terbatas, yang mempengaruhi komunikasi terbatas dikarenakan konsistensinya; Sumber Daya belum maksimal karena sumberdaya yang diberikan masih sangat kurang; Disposisi belum maksimal karena disposisi yang diberikan masih sangat terbatas dikarenakan efek disposisi dan

inisiatif; dan Struktur birokrasi belum maksimal karena struktur birokrasi yang di berikan masih kurang dikarenakan dalam membuat SOP dan Fragmentasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, terkait dengan sikap pelaksanaan suatu kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan tugas dengan baik namun masih kurangnya sosialisasi dan tanda larangan yang di berikan agar masyarakat bisa mematuhi tanda larangan tersebut sehingga lingkungan terminal kefamenanu bersih dari kotoran.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- KBBI (kamus besar bahasa Indonesia, 2007)
- Abal, M. (2015). *Kebijakan publik*. Bandung: DIPD-BOPTAN.
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Gode, A. (1959) What is communication. Journal of Communication
- Hovland, Irving K. Janis, and Kelley (1953), *Communication and Persuasion*, New Haven, CT: Yale University Press.
- Miles, Mathew B dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press (UI-PRESS), 2007. Jakarta.
- Subianto Agus. (2012). *Kebijakan publik*. Surabaya: PT Manuju Insan Cemerlang.
- Federick (dalam Agustino, 2008). *Konsep kebijakan publik*. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mangunjaya. (2007). *Pengelolaan sampah rumah tangga*. Makasar: Fakultas ilmu kesehatan UIN

- Alauddin Makasar.
- Tachjan. (2016). *Implementtasi kebijakan publik*. APII Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (IAPI) Bandung.
- Mandy Koe. (1969). *Populasi kependudukan*. Jakarta: EGC (buku kedokteran).
- Rusfiana, D. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta,vc.
- Setyawati. (2008). *Pendidikan kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suparno, D. D. (2017). *Implementasi kebijakan publik dalam praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Webster's Dictionary. (1979). *Konsep implementasi kebijakan publik*. Bandung: APII Bandung.
- Winarno. (2007). *Konsep kebijakan*. Yogyakarta: Media pressindo

Jurnal

- Dwiki Bagus Aryanto.(2020). Kebijakan Pengelolaan sampah di daerah Utama tujuan wisata. *Kebijakan publik*, 55-112, Widi Yaumul Fitri
- Jati, T. K (2013). Peran pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah di lingkungan permukiman perkotaan. *Wilayah dan lingkungan*, 1-16, Tri Kharisma Jati.
- Katalogis.(2014). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu*. 15-22, Talib.
- Lolowong Tommy.(2008). Refleksi dinamika reformasi organisasi birokrasi indonesia di masa depan. 2-1.
- Prastyo. (2016). Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tanjaung Pinang timur. *Evaluasi kebijakan*, 2-11, Maritim Raja Alihaji.
- Tuju, A. H (2016). Kinerja lurah dalam pelaksanaan program kebersihan. *Jurnal politik*, 1- 13, Agustinus H. F Tuju

Internet

<http://www.nisaihsani.com>. Kesehatan Lingkungan. Diakses pada Senin 19 Agustus 2021, pukul 18:50

<http://jurnal.umrah.ac.id>. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah, diakses pada Minggu, 05 September 2021, pukul 20:15

<https://eprints.uny.ac.id>. Teknik analisis data atau proses mencari data, di akses pada Senin, 11 Oktober 2021, pukul 15.30

<http://www.media.neliti.com>. Kinerja lurah dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan, di akses pada Kamis, 14 Oktober 2021, pukul 19:25